MITIGASI BENCANA KEBAKARAN DI KAWASAN PADAT PENDUDUK KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

HENDRI MARSANDI WIJAYA
NPP. 33. 0227
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik
Email : hendrimarsandi@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Arwanto Harimas Ginting, S.STP, M.Si
Email : arwantoharimasginting@ipdn.ac.id

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): *Palembang City faces serious challenges related to the increasing incidence of fires, especially in densely populated residential areas. The research focuses on Seberang Ulu I District, the area with the highest population density in Palembang City, reaching 15,773 people per square kilometer in 2024.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze fire disaster mitigation strategies in densely populated areas of Palembang City.* ***Method:*** *The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews with key informants from BPBD and the Fire Department, field observations, and documentation studies. Data analysis was performed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing stages assisted by NVivo 15 software.* ***Result:*** *The results indicate that fire disaster mitigation in Palembang City covers pre-disaster, disaster impact, and post-disaster dimensions. However, the implementation of mitigation in densely populated areas is not yet optimal due to structural constraints such as narrow road access for fire trucks, very close proximity between buildings, and the use of flammable building materials. Furthermore, low public awareness and preparedness, along with the lack of community-based fire volunteer groups, are major obstacles in creating a disaster-aware culture.* ***Conclusion:*** *This study suggests the need for strengthening sustainable education, improving cross-agency coordination, and empowering the community through the formation of neighborhood-level fire volunteers to increase independence in early mitigation.*

Keywords: *Community Preparedness; Densely Populated Areas; Fire Mitigation; Palembang City Government*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Kota Palembang menghadapi tantangan serius terkait peningkatan kejadian kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Fokus penelitian diarahkan pada Kecamatan Seberang Ulu I sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Palembang, yakni mencapai 15.773 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi mitigasi bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kota Palembang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan bantuan perangkat lunak NVivo. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi bencana kebakaran di Kota Palembang mencakup dimensi pra-bencana, dampak bencana, hingga pasca-bencana. Namun, pelaksanaan mitigasi di kawasan padat penduduk belum optimal karena kendala struktural seperti akses jalan yang sempit bagi armada pemadam, jarak antar bangunan yang sangat rapat, dan penggunaan material bangunan yang mudah terbakar. Selain itu, rendahnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat serta minimnya kelompok relawan kebakaran berbasis komunitas menjadi hambatan utama dalam menciptakan budaya sadar bencana. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan edukasi berkelanjutan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan relawan kebakaran di tingkat lingkungan untuk meningkatkan kemandirian dalam mitigasi awal.
Kata kunci: Kawasan Padat Penduduk; Mitigasi Kebakaran; Pemerintah Kota Palembang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosial yang kompleks. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia menghadapi berbagai potensi ancaman bencana, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Bencana pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bahaya (hazard), tetapi juga berkaitan erat dengan tingkat kerentanan masyarakat dan kapasitas dalam menghadapi risiko tersebut. Menurut Carter (1991), bencana terjadi sebagai akibat dari interaksi antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah dalam menghadapi kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Salah satu bencana nonalam yang memiliki tingkat risiko tinggi adalah kebakaran. Kebakaran merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kerugian besar dalam waktu singkat, baik berupa korban jiwa, kerusakan bangunan, kehilangan harta benda, maupun gangguan terhadap aktivitas sosial masyarakat.

Menurut Kurniawati (2020), kebakaran menjadi salah satu ancaman yang serius karena memiliki karakteristik penyebaran cepat dan membutuhkan penanganan yang tepat melalui pendekatan pencegahan serta kesiapsiagaan. Permasalahan kebakaran semakin kompleks ketika terjadi pada kawasan padat penduduk karena adanya keterbatasan ruang, kepadatan bangunan, serta rendahnya akses terhadap sarana penanggulangan kebakaran.

Kawasan padat penduduk memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap bencana kebakaran. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi bangunan yang saling berdekatan, penggunaan material yang mudah terbakar, keterbatasan jalur evakuasi, serta kesulitan akses kendaraan pemadam kebakaran. Sagala et al. (2016) menjelaskan bahwa risiko kebakaran perkotaan tidak hanya berasal dari faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti perilaku masyarakat, tingkat kesadaran, dan kemampuan komunitas dalam melakukan pencegahan serta respons awal terhadap kebakaran.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia membutuhkan pengelolaan risiko bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah kejadian, tetapi juga memperkuat aspek mitigasi sebelum bencana terjadi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun sistem mitigasi yang mampu melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, pemerintah memiliki fungsi utama dalam memberikan pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Ndraha (2003), pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan publik serta memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap ancaman yang dapat mengganggu keselamatan warga negara. Oleh karena itu, mitigasi bencana kebakaran menjadi bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik dan perlindungan masyarakat.

Kota Palembang sebagai salah satu pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan menghadapi tantangan dalam pengelolaan risiko kebakaran. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman menyebabkan beberapa wilayah mengalami peningkatan kepadatan bangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palembang, jumlah penduduk Kota Palembang terus mengalami perkembangan sehingga memberikan tekanan terhadap ruang permukiman.

Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, kejadian kebakaran di Kota Palembang menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 127 kejadian kebakaran bangunan, kemudian meningkat menjadi 172 kejadian pada tahun 2022, 175 kejadian pada tahun 2023, 187 kejadian pada tahun 2024, dan 239 kejadian pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa kebakaran masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan strategi mitigasi yang lebih efektif.

Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi adalah Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Kecamatan ini merupakan wilayah

dengan kepadatan penduduk tinggi, yaitu mencapai 15.773 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Tingginya kepadatan tersebut menyebabkan meningkatnya potensi penyebaran api apabila terjadi kebakaran karena jarak antarbangunan yang berdekatan serta keterbatasan ruang terbuka.

Kondisi tersebut terlihat dari beberapa kejadian kebakaran di Kecamatan Seberang Ulu I. Salah satu kejadian terjadi di Kelurahan 1 Ulu pada tahun 2025 yang menyebabkan sejumlah rumah terbakar. Cepatnya penyebaran api dipengaruhi oleh kondisi bangunan yang rapat dan akses jalan yang sulit dilalui kendaraan pemadam kebakaran.

Permasalahan kebakaran di kawasan padat penduduk tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga faktor sosial. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kebakaran, minimnya kesiapsiagaan warga, serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam membentuk kelompok siaga kebakaran menjadi tantangan dalam membangun budaya sadar bencana. Menurut Sumaryadi (2005), pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya.

Mitigasi kebakaran pada kawasan padat penduduk membutuhkan pendekatan terpadu antara upaya struktural dan nonstruktural. Upaya struktural dapat dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana seperti hidran, akses jalan pemadam, serta penguatan fasilitas keselamatan. Sementara itu, upaya nonstruktural dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, pelatihan masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pengurangan risiko bencana yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun ketahanan terhadap bencana.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan antara meningkatnya risiko kebakaran akibat kepadatan permukiman dengan kapasitas mitigasi yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai strategi mitigasi bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang untuk mengetahui pelaksanaan mitigasi, hambatan yang dihadapi, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Mitigasi Bencana Kebakaran di Kawasan Padat Penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan” menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk kajian terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengurangi risiko kebakaran dan meningkatkan perlindungan masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Kebakaran merupakan salah satu bentuk bencana nonalam yang memiliki risiko tinggi, terutama pada kawasan permukiman padat penduduk. Secara ideal, kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi harus memiliki sistem mitigasi yang kuat melalui kesiapan infrastruktur, regulasi, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara peningkatan risiko kebakaran dengan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pencegahan serta pengurangan dampak bencana.

Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. Berdasarkan kondisi wilayah, kepadatan penduduk Kecamatan Seberang Ulu I mencapai 15.773 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024 dengan luas wilayah yang relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan adanya tekanan terhadap ruang permukiman, sehingga banyak bangunan berdiri dengan jarak yang berdekatan dan berpotensi mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.

Tingginya kepadatan kawasan tidak hanya meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, tetapi juga memperbesar dampak yang ditimbulkan. Haq et al. (2023) menjelaskan bahwa kepadatan penduduk memiliki hubungan dengan peningkatan frekuensi kebakaran karena kawasan padat cenderung memiliki permasalahan seperti keterbatasan ruang antarbangunan, penggunaan material yang mudah terbakar, instalasi listrik yang kurang memenuhi standar, serta akses kendaraan pemadam kebakaran yang terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan padat penduduk membutuhkan strategi mitigasi yang lebih spesifik dibandingkan wilayah dengan kepadatan rendah.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah masih tingginya kejadian kebakaran di Kota Palembang. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang menunjukkan bahwa kejadian kebakaran bangunan mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 127 kejadian pada tahun 2021, meningkat menjadi 172 kejadian pada tahun 2022, 175 kejadian pada tahun 2023, 187 kejadian pada tahun 2024, dan mencapai 239 kejadian pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan risiko kebakaran.

Kecamatan Seberang Ulu I menjadi salah satu wilayah yang memiliki permasalahan tersebut. Beberapa kejadian kebakaran menunjukkan bahwa kawasan permukiman padat menghadapi kendala berupa cepatnya penyebaran api akibat bangunan yang berdempetan dan kesulitan akses kendaraan pemadam kebakaran. Salah satu kejadian di Kelurahan 1 Ulu menyebabkan sejumlah rumah terbakar karena api dengan cepat menjalar pada lingkungan permukiman yang padat serta akses jalan yang terbatas.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan aspek kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat pada kawasan padat penduduk masih menghadapi keterbatasan pengetahuan mengenai pencegahan kebakaran, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), sistem evakuasi, serta tindakan awal ketika terjadi kebakaran. Padahal, dalam konsep pengurangan risiko bencana, masyarakat bukan hanya sebagai penerima perlindungan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan bencana. Menurut Carter (1991), mitigasi bencana tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, perubahan perilaku, serta penguatan kelembagaan.

Selain faktor masyarakat, terdapat pula kesenjangan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pelayanan publik, regulasi, pemberdayaan, dan pembangunan. Ndraha (2003) menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui

pelayanan dan perlindungan. Dalam konteks kebakaran, fungsi tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, edukasi masyarakat, pengawasan lingkungan, dan pembentukan sistem kesiapsiagaan.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan mitigasi kebakaran di Kecamatan Seberang Ulu I, seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, minimnya akses pemadam kebakaran, keterbatasan fasilitas hidran, serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan mitigasi pada kawasan berisiko tinggi dengan kapasitas yang tersedia.

Kesenjangan lainnya terlihat dari belum optimalnya penerapan mitigasi yang bersifat terpadu. Upaya pengurangan risiko kebakaran seharusnya menggabungkan pendekatan struktural dan nonstruktural. Pendekatan struktural berupa penyediaan sarana keselamatan, perbaikan akses, serta pembangunan fasilitas pendukung, sedangkan pendekatan nonstruktural dilakukan melalui pendidikan kebencanaan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sumaryadi (2005), pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa permasalahan utama bukan hanya meningkatnya kejadian kebakaran, tetapi adanya ketidakseimbangan antara tingginya tingkat risiko kawasan padat penduduk dengan kapasitas mitigasi yang tersedia. Penelitian mengenai mitigasi bencana kebakaran di Kecamatan Seberang Ulu I menjadi penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana strategi pemerintah daerah, hambatan pelaksanaan, serta upaya penguatan mitigasi dalam menciptakan kawasan permukiman yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana kebakaran.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian untuk mengetahui perkembangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya, menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta menentukan posisi penelitian dalam memberikan kontribusi akademik. Kajian mengenai mitigasi bencana kebakaran telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik dari aspek risiko bencana, kesiapsiagaan masyarakat, kapasitas pemerintah, maupun strategi pengurangan risiko berbasis komunitas.

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan mitigasi bencana kebakaran pada kawasan rentan, khususnya kawasan permukiman padat penduduk.

Penelitian Sagala et al. (2016) berjudul *"The Evolution of Fire Risk in Urban Areas: A Case Study of Bandung City, Indonesia"* membahas mengenai risiko kebakaran perkotaan dengan pendekatan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kebakaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik seperti kepadatan bangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti perilaku masyarakat, kesiapsiagaan, dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji risiko kebakaran pada kawasan perkotaan. Perbedaannya, penelitian Sagala et al.

lebih menekankan pemetaan risiko kebakaran perkotaan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada strategi mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Selanjutnya, penelitian Rachmawati et al. (2020) mengenai *community-based disaster risk reduction* menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko bencana. Penelitian tersebut menemukan bahwa program mitigasi yang melibatkan masyarakat melalui pelatihan, edukasi, dan pembentukan kelompok siaga mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama melihat pentingnya kapasitas masyarakat sebagai bagian dari sistem mitigasi. Namun, penelitian Rachmawati et al. membahas pengurangan risiko bencana secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji mitigasi bencana kebakaran pada kawasan permukiman padat.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Kurniawati (2020) yang membahas mengenai kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana kebakaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan kebakaran, penggunaan alat pemadam api, serta prosedur evakuasi menjadi salah satu faktor yang meningkatkan dampak kebakaran. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa aspek nonstruktural berupa peningkatan kapasitas masyarakat memiliki peran besar dalam mitigasi kebakaran. Perbedaannya, penelitian Kurniawati lebih menitikberatkan pada kesiapsiagaan masyarakat, sementara penelitian ini mengkaji secara lebih luas melalui aspek pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah.

Penelitian Purnama et al. (2024) dengan judul *"Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai"* menggunakan pendekatan analisis risiko berdasarkan variabel ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah penelitian memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi sehingga diperlukan penguatan infrastruktur mitigasi seperti sumber air, fasilitas pemadaman, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal penggunaan konsep mitigasi berbasis risiko. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu Purnama et al. berfokus pada kebakaran hutan dan lahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kebakaran bangunan di kawasan padat penduduk perkotaan.

Selain itu, penelitian Lestari (2024) mengenai peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan edukasi kebencanaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi tidak cukup hanya melalui penyediaan sarana fisik, tetapi harus didukung oleh pemberdayaan masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan masyarakat sebagai unsur penting dalam mitigasi kebakaran. Perbedaannya adalah penelitian Lestari dilakukan dalam konteks wilayah desa, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kawasan perkotaan dengan karakteristik kepadatan penduduk tinggi.

Penelitian Umar (2024) mengenai mitigasi bencana kebakaran pada permukiman padat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar menemukan bahwa kawasan permukiman padat memiliki risiko tinggi akibat jarak antarbangunan yang sempit, penggunaan bahan mudah terbakar, dan kondisi instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan strategi mitigasi terpadu melalui pendekatan struktural dan nonstruktural. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji mitigasi kebakaran pada kawasan permukiman padat penduduk. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus analisis, yaitu penelitian ini lebih menekankan peran Pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa mitigasi bencana kebakaran merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Faktor risiko kebakaran tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah, kesiapan masyarakat, dan efektivitas kebijakan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pemetaan risiko, kesiapsiagaan masyarakat, atau kondisi teknis kawasan rawan kebakaran.

Adapun kesenjangan (gap) penelitian dalam penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang secara khusus menganalisis mitigasi bencana kebakaran pada kawasan padat penduduk dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama terkait bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat dalam mengurangi risiko kebakaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Mitigasi Bencana Kebakaran di Kawasan Padat Penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas mitigasi bencana kebakaran, baik dalam konteks pemetaan risiko, kesiapsiagaan masyarakat, maupun penguatan kapasitas komunitas. Penelitian sebelumnya seperti Purnama et al. (2024) lebih berfokus pada analisis tingkat risiko kebakaran berdasarkan variabel ancaman, kerentanan, dan kapasitas pada kawasan hutan dan lahan, sedangkan Lestari (2024) lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan di wilayah pedesaan. Selain itu, penelitian Umar (2024) yang memiliki kesamaan pada objek kawasan padat penduduk lebih berfokus pada kondisi fisik bangunan dan faktor penyebab kebakaran pada lingkungan permukiman.

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengkaji mitigasi bencana kebakaran pada kawasan padat penduduk dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya bagaimana Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjalankan fungsi pemerintahan dalam mengurangi risiko kebakaran. Fokus penelitian tidak hanya melihat faktor penyebab kebakaran, tetapi

menganalisis bagaimana pemerintah melakukan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada lokasi dan karakteristik wilayah penelitian. Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang memiliki karakteristik kawasan perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi, akses jalan terbatas, serta risiko penyebaran api yang cepat. Kondisi tersebut menyebabkan mitigasi kebakaran membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, kelembagaan, dan kapasitas masyarakat. Berdasarkan kondisi lapangan, permasalahan kebakaran di wilayah ini dipengaruhi oleh faktor kepadatan bangunan, keterbatasan akses kendaraan pemadam, minimnya fasilitas pendukung seperti hidran, serta rendahnya kesiapsiagaan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini berbeda dalam penggunaan pendekatan teori. Penelitian terdahulu banyak menggunakan pendekatan risiko bencana, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep mitigasi bencana menurut Carter (1991) yang melihat manajemen bencana melalui tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Penelitian ini memfokuskan kajian pada tahap pra-bencana yang terdiri dari tiga indikator utama, yaitu pencegahan (prevention), mitigasi/peringanan (mitigation), dan kesiapsiagaan (preparedness). Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi risiko kebakaran sebelum kejadian berlangsung.

Dalam perspektif pemerintahan, penelitian ini juga memiliki pembeda karena menggunakan pendekatan fungsi pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha (2003) yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks mitigasi kebakaran, fungsi tersebut terlihat melalui penyediaan pelayanan pemadam kebakaran, penyusunan regulasi keselamatan, pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta perlindungan masyarakat dari risiko bencana.

Kebaruan lainnya terdapat pada sudut pandang bahwa masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek yang menerima perlindungan, tetapi sebagai subjek yang memiliki peran dalam mengurangi risiko bencana. Hal ini sejalan dengan konsep pengurangan risiko bencana modern yang dikembangkan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) yang menekankan bahwa keberhasilan mitigasi bencana sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, peningkatan kapasitas lokal, dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa analisis mengenai bagaimana strategi mitigasi kebakaran dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada kawasan padat penduduk dengan mengintegrasikan aspek kelembagaan pemerintah, penyediaan layanan publik, penguatan kapasitas masyarakat, dan kondisi lingkungan perkotaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual bagi Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan efektivitas mitigasi bencana kebakaran.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi mitigasi bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kota Palembang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai mitigasi bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan strategi pemerintah daerah, upaya pencegahan, kesiapsiagaan masyarakat, serta hambatan yang dihadapi dalam mengurangi risiko kebakaran. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu maupun kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau fenomena tertentu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan melalui proses pengumpulan data secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan teori mitigasi bencana yang dikemukakan oleh Carter (1991) dalam *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Carter menjelaskan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada tahapan pra-bencana yang meliputi pencegahan (*prevention*), peringanan atau mitigasi (*mitigation*), serta kesiapsiagaan (*preparedness*). Pencegahan berkaitan dengan berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran melalui pengendalian faktor penyebab, pengawasan lingkungan, serta peningkatan pemahaman masyarakat. Mitigasi berkaitan dengan upaya mengurangi dampak apabila kebakaran terjadi melalui penyediaan sarana prasarana, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, kesiapsiagaan berkaitan dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran melalui pelatihan, penyusunan rencana, sistem informasi, dan koordinasi penanganan bencana.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi kawasan padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, terutama kondisi lingkungan permukiman, kepadatan bangunan, akses jalan, fasilitas pendukung mitigasi, serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut Sugiyono (2019), teknik *purposive sampling*

digunakan ketika peneliti membutuhkan sumber data yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang dikaji.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan mitigasi kebakaran, yaitu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, pejabat yang membidangi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, petugas pemadam kebakaran, Camat Kecamatan Seberang Ulu I, lurah pada wilayah penelitian, ketua RT/RW, serta masyarakat yang tinggal di kawasan rawan kebakaran. Pemilihan informan tersebut dilakukan karena pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Ndraha (2003) menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik dan perlindungan terhadap berbagai ancaman, termasuk bencana.

Selain wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi sebagai sumber data pendukung. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen kebijakan, laporan kejadian kebakaran, data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan mitigasi bencana kebakaran. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil penelitian serta memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi dan pelaksanaan mitigasi kebakaran di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang dilakukan melalui proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar peneliti dapat memahami pola, hubungan, dan makna dari fenomena yang ditemukan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan gambaran mengenai pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Moleong (2017), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber atau metode untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran, hambatan yang dihadapi, serta strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko kebakaran di kawasan padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mitigasi bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang menggunakan teori mitigasi bencana yang dikemukakan oleh Carter (1991). Carter menjelaskan bahwa mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui tindakan sebelum bencana terjadi. Dalam penelitian ini, mitigasi bencana kebakaran dianalisis melalui tiga dimensi utama yaitu pencegahan (prevention), mitigasi/peringanan (mitigation), dan kesiapsiagaan (preparedness). Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pengurangan risiko kebakaran pada kawasan permukiman padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Kawasan padat penduduk memiliki tingkat risiko kebakaran yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh kepadatan bangunan, keterbatasan ruang, akses pemadam yang terbatas, serta kondisi sosial masyarakat. Menurut Cutter (2003), tingkat risiko bencana tidak hanya ditentukan oleh ancaman, tetapi juga dipengaruhi oleh kerentanan sosial dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut. Oleh karena itu, mitigasi kebakaran membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.

3.1 Pencegahan (Prevention)

Penulis melakukan analisis terhadap aspek pencegahan bencana kebakaran melalui upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi faktor penyebab kebakaran sebelum kejadian terjadi. Pencegahan dalam mitigasi kebakaran berkaitan dengan bagaimana pemerintah melakukan edukasi, pengawasan, penyuluhan, serta pengendalian terhadap faktor penyebab kebakaran seperti instalasi listrik, penggunaan bahan mudah terbakar, dan perilaku masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, diketahui bahwa upaya pencegahan telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pemberian edukasi mengenai bahaya kebakaran, serta himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan permukiman.

Hal tersebut diperkuat melalui wawancara dengan salah satu petugas pemadam kebakaran yang menyampaikan bahwa: "Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di wilayah yang padat penduduk. Masyarakat diberikan pemahaman tentang penyebab kebakaran, penggunaan alat pemadam api ringan, dan bagaimana tindakan awal ketika terjadi kebakaran."

Berdasarkan hasil observasi penulis di Kecamatan Seberang Ulu I, masih ditemukan beberapa kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran seperti jarak antarbangunan yang relatif dekat, jalan lingkungan yang sempit, serta keterbatasan ruang terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan api lebih mudah menjalar apabila terjadi kebakaran.

Hasil dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa kejadian kebakaran di Kota Palembang masih terjadi dengan jumlah yang cukup tinggi. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang menunjukkan adanya

peningkatan kejadian kebakaran bangunan dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih perlu diperkuat terutama melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

Dalam perspektif pemerintahan, kegiatan pencegahan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ndraha (2003) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan edukasi kebakaran merupakan bagian dari pelayanan publik dalam bidang keselamatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa aspek pencegahan kebakaran di Kecamatan Seberang Ulu I telah berjalan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, namun masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat serta kondisi lingkungan permukiman yang meningkatkan risiko kebakaran.

3.2 Mitigasi/Peringanan (Mitigation)

Penulis menganalisis aspek mitigasi atau peringanan melalui upaya pemerintah dalam mengurangi dampak apabila terjadi kebakaran. Mitigasi tidak hanya berkaitan dengan penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas pendukung, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan sistem penanggulangan kebakaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, diketahui bahwa pemerintah melakukan beberapa langkah mitigasi seperti penyediaan armada pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas petugas, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam menghadapi kejadian kebakaran.

Salah satu informan dari pihak pemerintah menjelaskan: "Untuk wilayah padat penduduk tantangannya adalah akses masuk kendaraan pemadam. Karena itu kami terus melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan masyarakat agar ketika terjadi kebakaran proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat."

Hasil observasi menunjukkan bahwa salah satu kendala utama mitigasi kebakaran di Kecamatan Seberang Ulu I adalah kondisi lingkungan permukiman yang padat. Bangunan yang saling berdekatan menyebabkan penyebaran api menjadi lebih cepat, sementara jalan lingkungan yang sempit menjadi hambatan bagi mobil pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kejadian.

Menurut Sukmana (2018), risiko bencana muncul akibat adanya hubungan antara bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Semakin tinggi kerentanan suatu wilayah tanpa diimbangi kapasitas yang memadai, maka risiko bencana akan semakin besar. Kondisi tersebut sesuai dengan karakteristik Kecamatan Seberang Ulu I yang memiliki kepadatan penduduk tinggi sehingga membutuhkan penguatan kapasitas mitigasi.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mitigasi kebakaran. Sumaryadi (2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya. Dalam

konteks kebakaran, masyarakat perlu dilibatkan melalui pelatihan, pembentukan kelompok siaga, dan peningkatan kemampuan menghadapi kondisi darurat.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek mitigasi kebakaran di Kecamatan Seberang Ulu I telah dilakukan melalui penyediaan layanan pemadam kebakaran dan koordinasi pemerintah, namun masih membutuhkan peningkatan terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

3.3 Kesiapsiagaan (Preparedness)

Penulis melakukan analisis terhadap kesiapsiagaan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran. Kesiapsiagaan mencakup kemampuan melakukan tindakan awal, komunikasi darurat, koordinasi, serta kesiapan sarana dan sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I, diketahui bahwa sebagian masyarakat telah memahami tindakan awal ketika terjadi kebakaran, seperti menghubungi pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi mandiri. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur keselamatan kebakaran secara baik.

Salah satu masyarakat menyampaikan: "Kalau terjadi kebakaran biasanya warga langsung membantu memadamkan sebisanya, tetapi masih banyak yang panik karena belum tahu harus melakukan apa terlebih dahulu."

Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menghadapi kebakaran masih bersifat spontan dan belum sepenuhnya berbasis kesiapsiagaan yang terorganisasi. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pembentukan kelompok masyarakat siaga kebakaran pada tingkat lingkungan.

UNDRR menjelaskan bahwa pengurangan risiko bencana modern menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam membangun ketahanan bencana. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima perlindungan, tetapi juga memiliki peran sebagai aktor yang mampu mengurangi risiko melalui peningkatan kapasitas dan pengetahuan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kesiapsiagaan menjadi bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab membangun sistem peringatan dini, memberikan pelatihan, serta memastikan masyarakat memiliki kemampuan menghadapi kondisi darurat.

Berdasarkan hasil penelitian, kesiapsiagaan kebakaran di Kecamatan Seberang Ulu I sudah berjalan melalui koordinasi pemerintah dan masyarakat, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan rutin, pembentukan kelompok siaga kebakaran, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tindakan saat terjadi kebakaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang telah dilaksanakan melalui aspek pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Namun, masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan akses pemadam, kepadatan bangunan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar upaya pengurangan risiko kebakaran dapat berjalan lebih efektif.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko kebakaran telah dilakukan melalui berbagai strategi pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat. Penulis menemukan temuan penting bahwa keberhasilan mitigasi kebakaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis pemadam kebakaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah, kesiapan masyarakat, kondisi lingkungan, serta pola koordinasi antaraktor dalam menghadapi risiko kebakaran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada aspek pencegahan (*prevention*), pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang telah melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta penyampaian informasi mengenai bahaya dan pencegahan kebakaran. Namun, hasil penelitian juga menemukan bahwa upaya pencegahan masih menghadapi kendala karena karakteristik kawasan Seberang Ulu I yang padat penduduk, bangunan yang saling berdekatan, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap potensi bahaya kebakaran. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Sagala et al. (2016) yang menjelaskan bahwa risiko kebakaran di kawasan perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik, tetapi juga oleh faktor sosial seperti perilaku masyarakat dan tingkat kesiapsiagaan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat pendapat Cutter (2003) yang menjelaskan bahwa risiko bencana merupakan hasil interaksi antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Seberang Ulu I, ancaman berupa potensi kebakaran semakin meningkat karena adanya kerentanan berupa kepadatan bangunan dan keterbatasan akses pemadam kebakaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kebakaran.

Pada aspek mitigasi (*mitigation*), penelitian menemukan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti penyediaan layanan pemadam kebakaran, peningkatan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, serta penguatan kapasitas petugas dalam menangani kejadian kebakaran. Namun, masih terdapat keterbatasan berupa fasilitas pendukung yang belum optimal, seperti akses kendaraan pemadam menuju lokasi kebakaran, keterbatasan sarana lingkungan, serta belum meratanya fasilitas pencegahan kebakaran di kawasan permukiman.

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Purnama et al. (2024) yang menemukan bahwa mitigasi bencana membutuhkan penguatan kapasitas dan penyediaan sarana pendukung agar risiko bencana dapat dikurangi. Perbedaannya, penelitian Purnama et al. lebih berfokus pada mitigasi kebakaran hutan dan lahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kebakaran permukiman perkotaan dengan karakteristik kawasan padat penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa mitigasi kebakaran permukiman membutuhkan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pelayanan publik, aksesibilitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada aspek kesiapsiagaan (*preparedness*), penelitian menemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I telah memiliki bentuk kesiapsiagaan berupa tindakan spontan ketika terjadi kebakaran, seperti membantu proses pemadaman awal dan memberikan informasi kepada petugas. Namun, kesiapsiagaan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara sistematis karena belum semua masyarakat memahami prosedur evakuasi, penggunaan alat pemadam, serta mekanisme penanganan awal kebakaran.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kurniawati (2020) yang menemukan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran menjadi salah satu faktor yang meningkatkan dampak bencana. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan edukasi kebencanaan menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih banyak menempatkan masyarakat sebagai objek mitigasi, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat memiliki posisi penting sebagai bagian dari sistem penanggulangan kebakaran. Temuan ini sesuai dengan konsep pengurangan risiko bencana yang dikembangkan oleh UNDRR yang menekankan bahwa masyarakat harus menjadi aktor utama dalam membangun ketahanan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas lokal dan kolaborasi dengan pemerintah.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi kebakaran sangat dipengaruhi oleh fungsi pemerintah daerah. Ndraha (2003) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Dalam penelitian ini, fungsi tersebut terlihat melalui pelayanan pemadam kebakaran, kegiatan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, serta upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko kebakaran.

Dari sisi pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan warga menjadi faktor pendukung dalam mengurangi risiko kebakaran. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap bahaya kebakaran akan lebih cepat melakukan tindakan awal ketika terjadi bencana. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumaryadi (2005) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya melihat kebakaran sebagai persoalan teknis, tetapi menganalisis mitigasi kebakaran sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian terdahulu seperti Sagala et al. (2016), Kurniawati (2020), dan Purnama et al. (2024) lebih banyak membahas risiko dan kesiapsiagaan kebakaran, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah daerah menjalankan peran pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi risiko kebakaran di kawasan padat penduduk.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana kebakaran di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang telah berjalan melalui aspek pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, tetapi masih membutuhkan penguatan terutama dalam peningkatan partisipasi masyarakat, penyediaan fasilitas pendukung, serta pengembangan sistem mitigasi berbasis

komunitas agar kawasan padat penduduk menjadi lebih tangguh terhadap ancaman kebakaran.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa mitigasi bencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang telah dilaksanakan melalui tiga aspek utama yaitu pencegahan (*prevention*), mitigasi/peringanan (*mitigation*), dan kesiapsiagaan (*preparedness*) sebagaimana konsep mitigasi bencana menurut Carter (1991). Pada aspek pencegahan, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melakukan berbagai upaya berupa sosialisasi, edukasi masyarakat, serta penyampaian informasi mengenai bahaya dan pencegahan kebakaran. Namun, pelaksanaan pencegahan masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan kondisi lingkungan permukiman yang memiliki tingkat kerentanan tinggi akibat kepadatan bangunan.

Pada aspek mitigasi, pemerintah daerah telah berupaya mengurangi dampak kebakaran melalui penyediaan layanan pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas petugas, serta koordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat hambatan berupa keterbatasan akses kendaraan pemadam kebakaran, kondisi jalan lingkungan yang sempit, serta belum optimalnya sarana pendukung mitigasi kebakaran di kawasan padat penduduk Kecamatan Seberang Ulu I.

Pada aspek kesiapsiagaan, masyarakat telah menunjukkan peran dalam menghadapi risiko kebakaran melalui tindakan awal ketika terjadi bencana dan kerja sama dengan pemerintah. Akan tetapi, kesiapsiagaan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan kebencanaan, pemahaman penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), pembentukan kelompok siaga kebakaran, serta peningkatan sistem komunikasi darurat berbasis masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan mitigasi kebakaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan kolaborasi antaraktor dalam membangun ketahanan wilayah.

Temuan penelitian ini memperkuat bahwa mitigasi bencana kebakaran pada kawasan padat penduduk membutuhkan pendekatan terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan pemadam kebakaran, tetapi juga sebagai pengarah, pemberdaya, dan pelindung masyarakat sebagaimana fungsi pemerintahan menurut Ndraha (2003). Dengan demikian, penguatan kapasitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kebakaran di wilayah perkotaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada ruang lingkup lokasi penelitian yang hanya dilakukan pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan kondisi pada wilayah tersebut. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan pengumpulan data lebih berfokus pada informan utama dari pemerintah dan masyarakat sehingga belum sepenuhnya menggambarkan seluruh perspektif pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam mitigasi kebakaran.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai mitigasi bencana kebakaran masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat dilakukan pada wilayah lain dengan karakteristik kawasan padat penduduk yang berbeda, serta mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas kebijakan pemerintah daerah, pengembangan sistem mitigasi berbasis komunitas, dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung deteksi dini serta penanganan kebakaran.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang beserta jajarannya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang, perangkat Kecamatan Seberang Ulu I dan pihak kelurahan, serta seluruh masyarakat di wilayah penelitian yang telah memberikan kesempatan dan keterbukaan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah tulus membantu, memberikan data, dan mendukung kesuksesan pelaksanaan penelitian ini dari awal hingga akhir.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Hatta, M. (1992). *Kumpulan karangan* (Jilid I). Jakarta: UI-Press. ISBN: 979-456-028-7.

Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya* (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. ISBN: 978-979-769-698-4.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. ISBN: 978-602-7825-43-9.

Simangunsong, F., Hutasoit, I., & Sentosa, I. (2019). A strategic framework of good governance, infrastructure development and community empowerment in Indonesian public sector management. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, (Special Issue), 1–12. Diakses dari https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85083580117

Elsye, R. (2022). Pengembangan UMKM pada destinasi wisata Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 64–72. DOI: https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2399

Santoso, E. B., Moenek, R., Rahmadanita, A., & Ramadhani, W. (2022). Pemberdayaan usaha mikro pengrajin kain tenun Ulap Doyo di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 22–37. DOI: https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.3036

Khasanah, N., Sriyana, J., Prasetyo, A., Nurdinawati, V., Hartopo, A., Wahyudianto, H., Gartika, D., & Fahlevi, M. (2022). The role of knowledge management and sharing in cooperatives practices toward National Economic Recovery

in the COVID-19 pandemic era. *Frontiers in Public Health*, 10, 963755. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.963755

Tobing-David, V. E., Adi, I. R., & Nuryana, M. (2024). Conditions of sustainable welfare: A cross-case empirical analysis of 22 locality-based welfare systems in decentralised Indonesia. *Sustainability*, 16(4), 1629. DOI: https://doi.org/10.3390/su16041629

Tambunan, T. T. H. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 18. DOI: https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4

Asyiah, S., Lestari, R. Y., & Juwandi, R. (2022). Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Serang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6695–6704. DOI: https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299

Najib, A., & Mursyidah, L. (2023). Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 1–15. DOI: https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.9624

Nurhidayati, S., Hidayah, N., & Rahmawati, D. (2023). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri kecil di wilayah Moyo Hilir: Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. *GOVERNANSI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 112–126. DOI: https://doi.org/10.33701/governansi.v9i2

Islam, A., & Eriyanti, F. (2024). Peran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam pemberdayaan industri kecil masyarakat (IKM) di Desa Balai Batu Sandaran. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 12. DOI: https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.134

Marsya Santya, V., & Kustini. (2025). Penguatan peran Dinas Koperasi dalam pengawasan dan sistem manajemen berbasis teknologi di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 4(1), 35–48. DOI: https://doi.org/10.59895/japk.v4i1

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari https://jdih.setneg.go.id

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/46836/uu-no-25-tahun-1992

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Kompas. (2025, Maret). Kontribusi koperasi terhadap PDB nasional hanya 0,97 persen. Diakses dari https://www.kompas.com

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025). *Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Diakses dari https://kemenkopukm.go.id

Pemerintah Kota Semarang. (2025). *Program Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Semarang*. Diakses dari https://semarangkota.go.id

Tribunnews. (2025, Agustus). Baru 7 Koperasi Merah Putih aktif beroperasi di Kota Semarang. Diakses dari https://www.tribunnews.com